

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: KENCANA PRANADAMEDIA GROUP, 2012.
- Bakhri, Syaiful. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Edited by Ibnu Sina Chandranegara. Gramanata Publishing, 2012.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, and Gomgom T.P. Siregar. Perdata Teori Dan Praktek. CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023.
file:///D:/BUKU/HukumAcaraPerdata -261223.pdf.
- Effendie, Bachtiar, Masdari Tasmin, and A.Chodari Adp. Surat Gugatan Dan Pembuktian Dalam Perkara Perdata. PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gusti Gema Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." Notarius 12, no. 1 (2019).
- Hermawan, Ahmad Fauzan. "ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Analisis Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP Dan Putusan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)," no. 1392 (2016): 1–23.
- Imaduddin, Mochammad Iqbal, Novita Hapsari Mat Furu, Nurillia Nadratus Saadzah, and Nyoni Novia Nurlia Rahmatin Indriani. "Penemuan Hukum Dan Penafsiran Hukum." Universitas Bojonegoro 6, no. 1 (2025): 457.
- International Development Law Organization(IDLO). "Bukti Elektronik Dalam Persidangan." International Development Law Organization(IDLO), 2015.
- Izaak S., Leihitu, and Fatimah Achmad. Intisari Hukum Acara Perdata. GHALIA INDONRSIA, 1982.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum

- Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27.
- Laela Fakhriah, Efa. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102.
- Laila, M. Rasyid, and Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 2015.
- Latifah Soroinda, Disriani, and Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 384–405. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/4>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Pemerintah pusat. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen, 1945.
- Pribadi, Insan. “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 109–124.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata BRG/HIR*, 2002.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: P.T. PRADNYA PARAMITA, 1983.
- Sulistiyono, Happy Try. “Perspektif Hakim Terhadap Pengajuan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kalianda” (2014): 28–73. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7121>.
- Vindi Mayce, Seldya, Risma Riski Ramadani, Riska Nuvia Cahyani, and Teralia Anataya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-Commerce.” *PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan)* 2, no. 1

(2023): 1–11.

Wahyuni, Helya Silva. “Pertimbangan Hukum Hakim Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/2020/PN-Mre).” Universitas Sriwijaya, 2022.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), 1926.

